

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Dikoro. W. P. 2002. *Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama
- Dikoro. W. P. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Djaja. E. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group.
- Effendi. T. 2019. *Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Hamdan. M. 2012. *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamzah, A. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah. A. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap. Y. M. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Hartanti, E. 2012. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

- Manao, D.F. 2017. *Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Marpaung, L. 2012. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mulyadi, L. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alumni Bandung.
- Prasetyo, T. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press
- R. Achmad. 2020. *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Renggong, R. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Salle. 2018. *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sinaga, D. 2019. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media.
- Tirtamidjaja. 1955. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco.
- Yusni, M. 2019. *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Jawa Timur: Airlangga University Press.

Artikel

Ardiansyah, A. 2022. *Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pertimbangan Hakim Putusan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Dewanto, Pandu. 2020. *Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengeketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan*. Jurnal Ius Constituendum. Mojokerto.

H. Heri dan Rizki Lukman. 2020. *Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Tuntutan Putusan Serta Merta Dalam Gugatan Perdata yang Diajukan di Pengadilan Negeri*. Jurnal Verstek Vol 8 No 2. Solo: Universitas Sebelas Maret

Isnantiana, N. I. 2017. *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*. Jurnal Pemikiran Islam. Purwokerto. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Monintja, E. S. 2020. *Tinjauan Yuridis Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Delik Materil Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No 25/PUU-XIV/2016*. Jurnal Lex Crime Vol IX No 2.

Monteiro, J. M. 2007. *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum Pro Justisia. Kupang NTT.

Napisa. S. dan Hafizh Yustio. 2021. *Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol 2 Issue 2. Jakarta: Universitas Mercu Buana Jakarta.

- Pattudju, N. O. 2021. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Penyelenggara Negara di Kota Makassar*. Makassar: Universitas Bosowa.
- Pattudju, N. O. 2021. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Penyelenggara Negara di Kota Makassar*. Makassar: Universitas Bosowa.
- Pratama, Ilham W. 2019. *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Jurnal Lex Renaissance. Yogyakarta.
- Rahardjo. M. 2017. *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim
- Saifuddin, Bendaharo. 2017. *Dampak dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Warta Edisi 52. Universitas Dharmawangsa.
- Wahyuni, F. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal PT. Nusantara Utama Persada. ISBN 978-602-50419-1-1.
- Waluyo. B. 2014. *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Yuridis.
- Zainal, A. 2016. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan*. Kendari: IAIN Kendari.

Undang-Undang

- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta.

Menteri Negara Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta.

Website

<https://deepublishstore.com/blog/materi/hukum-pidana/> diakses pada 20 September 2022 pukul 19.13 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim> diakses pada tanggal 22 September 2022 pukul 21.32 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/disparitas-putusan-hakim-dalam-perkara-narkotika-lt5705da9c9e32d> diakses pada 20 September 2022 pukul 20.38 WIB.